



**PENGARUH INDEPENDENSI, MOTIVASI, DAN KOMPETENSI
TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT APARAT INSPEKTORAT
DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki)

SKRIPSI

Oleh :
Wienda Permatasari
NIM 090810301058

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PENGARUH INDEPENDENSI, MOTIVASI, DAN KOMPETENSI
TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT APARAT INSPEKTORAT
DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
program strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh :
Wienda Permatasari
NIM 090810301058

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untukku mengerjakan, menyelesaikan, serta mempertanggung jawabkan skripsi ini maka akan aku persembahkan karya tulis ini untuk :

1. Ayahanda Maksun dan Ibunda Siti Muhanah serta Suamiku Fathur Rozi tercinta, yang telah memberikan doa, kasih sayang, semangat serta semua kebaikan yang tak terhingga, yang kesemuanya menjadi penguat di saat-saat sulitku selama ini.
2. Kakakku Bagus dan Adikku Mega yang telah menjadi motivasiku untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk mimpi dan masa depan.
3. Adik Iparku Muta' Awifa dan Sahabat-sahabatku, Meme, Lita, Omik dan Hadi, yang telah mendukung, membantu dan memberikan semangat padaku.
4. Almamaterku, Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang selalu aku banggakan.

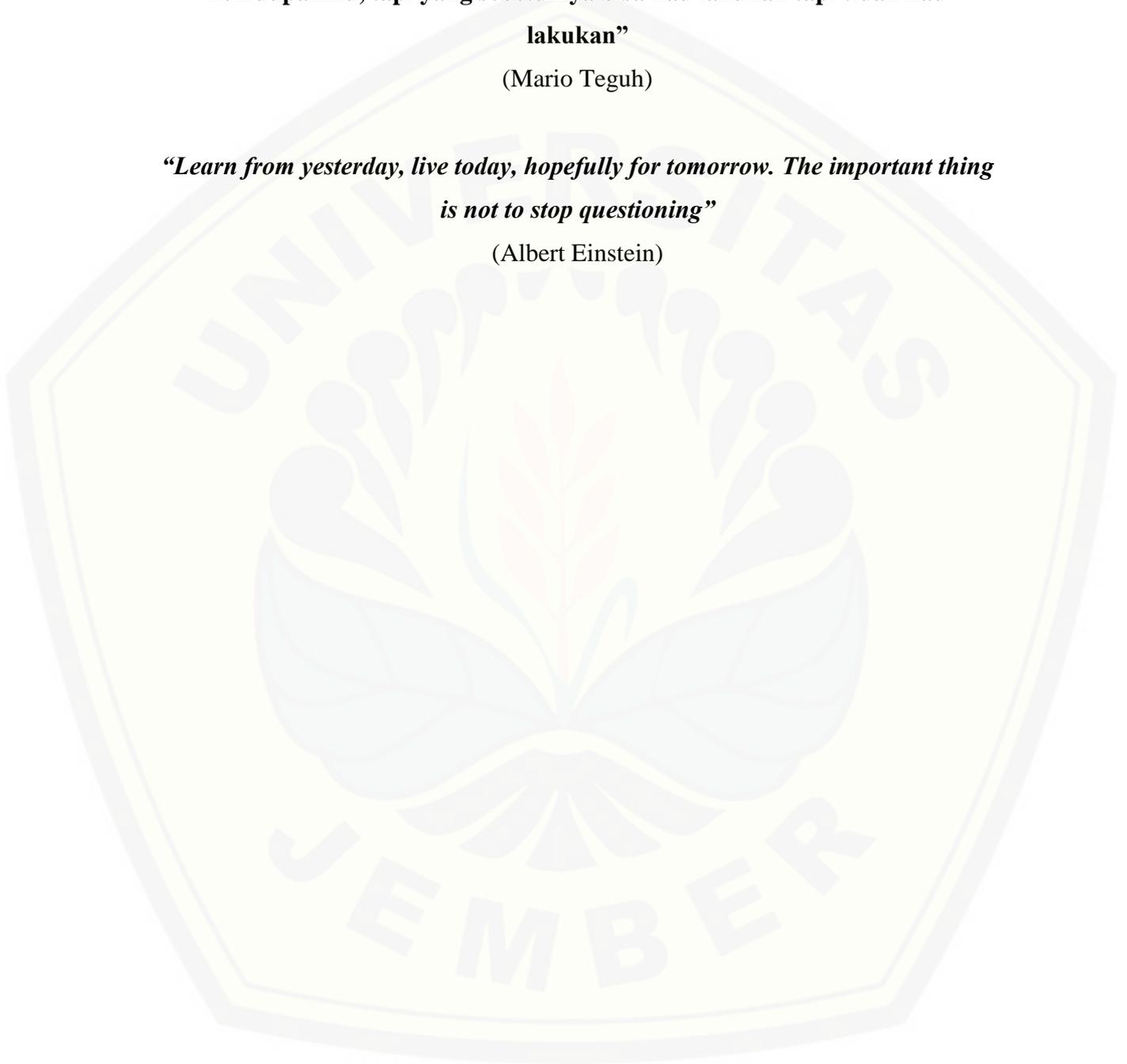
MOTTO

“ Bukan yang tidak bisa kau kerjakan yang akan melemahkan kehidupanmu, tapi yang sebetulnya bisa kau lakukan tapi tidak kau lakukan”

(Mario Teguh)

“Learn from yesterday, live today, hopefully for tomorrow. The important thing is not to stop questioning”

(Albert Einstein)



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wienda Permatasari
NIM : 090810301058
Jurusan : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Independensi, Motivasi, dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki)

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat adalah benar - benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam submateri disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 November 2015

Wienda Permatasari
090810301058

SKRIPSI

**PENGARUH INDEPENDENSI, MOTIVASI, DAN KOMPETENSI
TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT APARAT INSPEKTORAT
DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki)

Oleh :
Wienda Permatasari
NIM 090810301058

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Wasito, M. Si, Ak
Dosen Pembimbing Anggota : Andriana, SE, M. Sc

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Independensi, Motivasi, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Besuki)

Nama Mahasiswa : Wienda Permatasari

Nomor Induk Mahasiswa : 090810301058

Jurusan : Akuntansi / S1

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Wasito, M.Si, Ak.

NIP. 19600103 199103 1 001

Andriana, SE, M.Sc.

NIP. 19820929 201012 2 002

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak.

NIP. 19710727 199512 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

**Skripsi Berjudul:
PENGARUH INDEPENDENSI, MOTIVASI, DAN KOMPETENSI
TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT APARAT INSPEKTORAT
DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-
Karesidenan Besuki)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : WIENDA PERMATASARI

NIM : 090810301058

Jurusan : S1 AKUNTANSI-R

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

23 NOVEMBER 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji:

1. Ketua : Indah Purnamawati, SE, M.Si, Ak (.....)
NIP. 19691011 199702 2 001
2. Sekretaris : Kartika, SE, M.Sc, Ak (.....)
NIP. 19820207 200812 2 002
3. Anggota : Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak (.....)
NIP. 19710217 200003 1 001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh independensi, motivasi dan kompetensi aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki (Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi). Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparat Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki yang terlibat dalam tugas pemeriksaan yang berjumlah 88 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah aparat Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai auditor ang berjumlah 36 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu kuesioner. Metode analisis data menggunakan uji regresi berganda, di mana dari pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa independensi, motivasi dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

Kata Kunci : Kualitas audit, independensi, motivasi dan kompetensi.

ABSTRACT

This study aims to analyze and obtaining empirical evidence of “The influence of independence, motivation and competence of the officers towards the inspectorate’s audit quality in financial supervision of the region”. The empirical study conducted in Inspectorate Offices of Besuki Regions (Jember, Bondowoso, Situbondo, and Banyuwangi). The population in this study were all 88 officers of inspectorate offices from all regions of Besuki that involved in the inspection. This study took a sample of the officers of inspectorate in Besuki Regions who have been trained as an auditor, in total of 36 people. This study using a primary data taken from the questionnaire. The result from regression analysis of each hypotheses are shows that the independence, motivation and competence affect the quality of inspectorate’s audit in financial supervisions of the regions.

Keywords : *Audit Quality, Independence, Motivation and Competence.*

RINGKASAN

Pengaruh Independensi, Motivasi, dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki); Wienda Permatasari; 090810301058: halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh independensi, motivasi dan kompetensi aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan penting untuk meningkatkan kualitas audit dari pengelolaan keuangan karena dengan kebijakan desentralisasi maka pemerintah daerah telah memperoleh otoritas tidak hanya untuk mengelola sumber daya alam tetapi juga di bidang keuangan. Sebagaimana dapat dilihat dimana kondisi saat ini, masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya. Hal ini terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparat Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki (Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi) yang terlibat dalam tugas pemeriksaan yang berjumlah 88 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah aparat Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki (Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan

Kabupaten Banyuwangi) yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai auditor ang berjumlah 36 orang.

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan koefisien determinasi dalam penelitian ini tampak bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,782. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen, yaitu independensi, motivasi dan kompetensi terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit yang diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 78,2%, sedangkan sisanya sebesar 21,8% diterangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Setelah melakukan pengujian hipotesis disimpulkan bahwa independensi, motivasi dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

SUMMARY

The Effect of Independence, Motivation and Competence of the Quality Of Audit Apparatus Inspectorate in the Financial Supervision (An Empirical Study On Inspectorate Office Regency/ City Residency Besuki); Wienda Permatasari; 090810301058: 54 pages; Departement of Accounting Faculty of Economic Jember University.

This study aims to analyze and obtaining empirical evidence from the influence of independence, motivation and competence of the officers towards the inspectorate's audit quality in financial supervision of the regions. This research findings can be the one of important input to increase an audit quality from the financial management because, with the existence of desentralization policy, the local government have acquired not only the authorities to manage natural resources but also the fianacial sector. As can be seen in current condition, there are regions which are not yet ready with the government system in order to hold good corporate governance. Many cases that occured in some regions are related to corruptions, errors, missappropriate of authority, violations, and other criminal cases. The weak of internal control in the goverment is one cause of an inefficiency and ineffectiveness in local government. It also impact on the bugdet waste and local finances.

The population in this study were all 88 officers of the Inspectorate Offices from all Besuki's region (Jember, Bondowoso, Situbondo and banyuwangi) that involved in the inspection. The study using 36 officers of inspectorate offices in Besuki's region who have been trained as an auditor.

The result based on the calculation of coefficient determination shows the value is 0,782 which means that the level of independence, motivation and competence as an independent variables described in the models is 78,2% while the remaining 21,8% described by the other factors excluding from the models. From the test of hypothesis, it can be concluded that independence, motivation and competence affect the quality of inspectorate audit in financial supervision of the regions.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Hidayah, Kesempatan dan Kemudahan yang telah diberikan – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Independensi, Motivasi, dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah** (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki)”.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Bapak Dr. M. Fathorrazi, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, M. Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Jember dan Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Wasito, M. Si, Ak, selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan sejak awal hingga akhir pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Andriana, SE, M. Sc, selaku dosen pembimbing II dan dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Penguji, terima kasih telah membuat penulis menjadi tahu kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Jember khususnya pada jurusan S1 Akuntansi.
7. Teman – teman seperjuangan di Akuntansi Universitas Jember, yang tidak bisa saya sebut satu per satu terima kasih untuk kata – kata semangat dan motivasi yang selama ini kalian sampaikan padaku walau sekedar lewat salam, sapa dan canda.

8. Seluruh staf Administrasi Jurusan Akuntansi Universitas Jember atas bantuannya dalam memberikan kelancaran kepengurusan administrasi skripsi ini dari awal hingga akhir.
9. Serta sederet pihak – pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.

Tak ad gading yang tak retak. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Begitu pula dengan karya tulis ini. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berbesar hati menerima semua kritik, saran, dan masukan yang membangun guna kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. Demikian kata pengantar dari penulis, dan semoga karya tulis ini memberiakan manfaat untuk berbagai pihak.

Jember, 05 November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

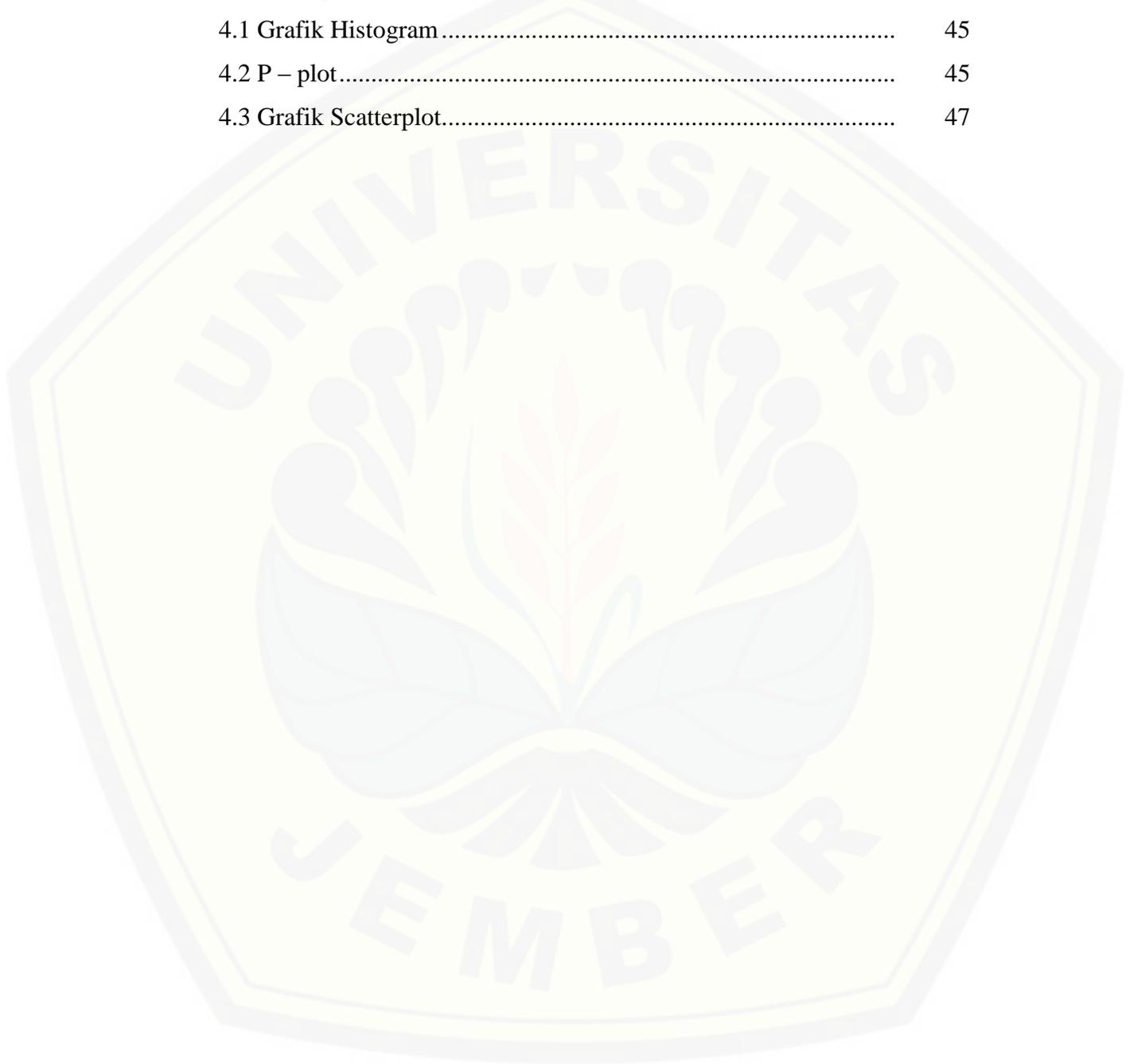
| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| HALAMAN PEMBIMBINGAN..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| RINGKASAN | x |
| SUMMARY..... | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 8 |
| 2.1.1 <i>Grand Theory</i> : Teori Harapan | 8 |
| 2.1.2 Pengertian Audit | 9 |
| 2.1.3 Proses Audit Sektor Publik..... | 9 |
| 2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah | 10 |
| 2.1.5 Pengertian Pengawasan | 10 |
| 2.1.6 Pengawasan Keuangan Daerah..... | 11 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1.7 Pengertian Inspektorat | 12 |
| 2.1.8 Pengertian <i>Good Governance</i> | 14 |
| 2.1.9 Kualitas Audit | 14 |
| 2.1.10 Independensi | 15 |
| 2.1.11 Motivasi | 16 |
| 2.1.12 Kompetensi | 18 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 19 |
| 2.3 Kerangka Konseptual | 25 |
| 2.4 Pengembangan Hipotesis | 25 |
| 2.4.1 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit. | 25 |
| 2.4.2 Pengaruh Motivasi terhadap Kualitas Audit..... | 26 |
| 2.4.3 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit... | 27 |
| BAB 3. METODE PENELITIAN..... | 29 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 29 |
| 3.2 Populasi dan Sampel | 29 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| 3.4 Definisi Operasional..... | 31 |
| 3.4.1 Variabel Kualitas Audit | 31 |
| 3.4.2 Variabel Independensi | 32 |
| 3.4.3 Variabel Motivasi | 32 |
| 3.4.4 Variabel Kompetensi | 33 |
| 3.5 Metode Analisis Data | 33 |
| 3.5.1 Statistik Deskriptif | 33 |
| 3.5.2 Uji Kualitas Data | 33 |
| 3.5.3 Uji Asumsi Klasik..... | 34 |
| 3.6 Metode Pengujian Hipotesis..... | 35 |
| 3.6.1 Analisis Regresi Berganda..... | 35 |
| 3.6.2 Uji F | 36 |
| 3.6.3 Uji t | 36 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | 38 |
| 4.1 Deskripsi Data | 38 |

| | |
|--|-----------|
| 4.1.1 Deskripsi Lokasi | 38 |
| 4.1.2 Demografi Responden | 38 |
| 4.2 Statistik Deskriptif..... | 40 |
| 4.2.1 Independensi | 40 |
| 4.2.2 Motivasi | 41 |
| 4.2.3 Kompetensi | 41 |
| 4.2.4 Kualitas Audit..... | 42 |
| 4.3 Uji Kualitas Data..... | 42 |
| 4.3.1 Uji Validitas..... | 42 |
| 4.3.2 Uji Realibilitas | 43 |
| 4.4 Uji Asumsi Klasik | 44 |
| 4.4.1 Uji Normalitas | 44 |
| 4.4.2 Uji Multikolinieritas | 46 |
| 4.4.3 Uji Heterokedastisitas | 46 |
| 4.5 Pengujian Hipotesis..... | 48 |
| 4.5.1 Analisis Regresi Berganda..... | 48 |
| 4.5.2 Koefisien Determinasi | 48 |
| 4.5.3 Uji F..... | 49 |
| 4.5.4 Uji t | 49 |
| 4.6 Pembahasan..... | 51 |
| 4.6.1 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit. | 51 |
| 4.6.2 Pengaruh Motivasi terhadap Kualitas Audit..... | 52 |
| 4.6.3 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit... | 53 |
| BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 55 |
| 5.1 Kesimpulan | 55 |
| 5.2 Keterbatasan | 55 |
| 5.3 Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------|----|
| 2.1 Kerangka Konseptual..... | 25 |
| 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah..... | 37 |
| 4.1 Grafik Histogram..... | 45 |
| 4.2 P – plot..... | 45 |
| 4.3 Grafik Scatterplot..... | 47 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 2.1 Rincian Faktor Penghargaan..... | 17 |
| 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu | 22 |
| 3.1 Tabel Skala Likert..... | 31 |
| 4.1 Distribusi Data..... | 38 |
| 4.2 Demografi Responden | 39 |
| 4.3 Statistik Deskriptif | 40 |
| 4.4 Tanggapan Responden..... | 40 |
| 4.5 Hasil Uji Validitas | 43 |
| 4.6 Hasil Uji Realibilitas..... | 43 |
| 4.7 Hasil Uji Normalitas | 44 |
| 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas..... | 46 |
| 4.9 Hasil Uji Heterokedastisitas | 47 |
| 4.10 Hasil Regresi Berganda | 48 |
| 4.11 Hasil Koefisien Determinasi..... | 49 |
| 4.12 Hasil Uji F | 49 |
| 4.13 Hasil Uji t..... | 50 |
| 4.14 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis | 51 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. : Kuesioner Penelitian
2. : Data Mentah Penelitian
3. : *Output* SPSS Distribusi Responden
4. : *Output* SPSS Statistik Deskriptif
5. : *Output* SPSS Uji Validitas
6. : *Output* SPSS Uji Realibilitas
7. : *Output* SPSS Uji Normalitas
8. : *Output* SPSS Uji Multikolinieritas
9. : *Output* SPSS Uji Heterokedastisitas
10. : *Output* SPSS Uji Regresi Berganda

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*. Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemeriksaan (*audit*) merupakan hal yang paling signifikan dan dalam hal pelaksanaan terciptanya *good governance*.

Pemeriksaan yang dilakukan di daerah atau kabupaten setempat dilakukan oleh auditor yang berada di kantor inspektorat daerah masing-masing. Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Suatu pengawasan yang cukup andal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan adalah suatu hal yang sangat diperlukan sebab dengan adanya suatu pengawasan yang cukup andal, diharapkan dapat menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor

publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggung jawabkan. Agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang nantinya dapat mengakibatkan resiko tuntutan hukum terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya, maka pengelolaan keuangan pemerintah seharusnya didukung audit sektor publik yang berkualitas. Kondisi saat ini, masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya. Hal ini terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah.

Di sisi lain, masih menjadi tanda tanya besar di kalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran serta dari fungsi pengawasan termasuk para pejabat pengawas yang berada di lingkungan fungsi pengawasan atau inspektorat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, terutama dalam upaya untuk mengawal berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan penting auditor inspektorat dan pimpinan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah. Untuk mencapai keinginan dan harapan tersebut, setiap pekerjaan audit yang dilakukan harus terkoordinasi dengan baik antara fungsi pengawasan dengan berbagai fungsi, aktivitas, kegiatan, ataupun program yang dijalankan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Basuki dan Krisna dalam Queena (2012) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu *issue* yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut pandang masing-masing

pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku auditor yang melakukan audit.

Seorang auditor harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 1998) dalam Efendy (2010). Pernyataan standar umum kedua SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik. Namun, belum tentu auditor yang memiliki kedua hal di atas akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik.

Menurut Mulyadi dan Puradireja (1998:25) dalam Kisnawati (2012), independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran pertimbangan obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta.

Motivasi dalam diri sangat penting peranannya dalam mendorong seseorang untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Motivasi yang dimiliki auditor mendorong personal auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yaitu kualitas audit yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001) dalam Efendy (2010) , hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan standar umum pertama SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2009) dalam Ahmad, dkk. (2011), Auditor yang kompeten adalah auditor yang mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan audit menurut hukum dan memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup untuk melakukan tugas audit. Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek audit. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi auditor. Kompetensi ditunjukkan pula dengan keharusan bagi setiap auditor untuk memiliki keterampilan atau kemahiran profesi auditor yang diakui umum untuk melakukan audit. Karena itu secara profesi tidak semua orang boleh melakukan audit. Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia

tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah.

Kompetensi juga dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalamannya dalam mengaudit klien. Dalam Setiawan (2011) kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan, dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit yang bertujuan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, keefektifan, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas audit telah dilakukan oleh Efendy (2010), menyatakan kompetensi dan motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Kisnawati (2012), menyatakan kompetensi dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Bolang,dkk (2013), menyatakan kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2010) yaitu pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat Inspektorat Kota Gorontalo. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian - penelitian terdahulu sering melakukan penelitian hanya pada satu kabupaten saja dan jumlah sampel yang digunakan terlalu sedikit. Oleh karena itu peneliti ingin menambah jumlah sampel dengan memperluas lokasi penelitian, yaitu di Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki (Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten

Banyuwangi), peneliti memilih keempat wilayah tersebut untuk dijadikan objek penelitian karena penelitian ini belum pernah dilakukan di empat wilayah tersebut dan karakteristik masyarakatnya masih memiliki persamaan satu sama lain. Selain itu, adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu juga mempengaruhi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang dengan judul : **“Pengaruh Independensi, Motivasi, dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah”** (Studi Empiris Pada Inspektorat Wilayah se-Karesidenan Besuki).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat se-Karesidenan Besuki dalam pengawasan keuangan daerah?
2. Apakah motivasi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat se-Karesidenan Besuki dalam pengawasan keuangan daerah?
3. Apakah kompetensi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat se-Karesidenan Besuki dalam pengawasan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh independensi aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh motivasi aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

3. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kompetensi aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik harus mempunyai kontribusi atau manfaat kepada pengguna hasil penelitian. Secara spesifik manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dalam hal kebijakan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit agar dapat meminimalisir resiko yang terjadi atau akan terjadi.

2. Bagi Praktisi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan suatu fakta baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Sehingga dari kelemahan atau kelebihan yang ditemukan dalam penelitian ini, dapat diperbaiki atau dimanfaatkan dengan baik pada praktiknya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi penelitian dengan tema yang sama.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Grand Theory* : Teori Harapan

Teori harapan memprediksi bahwa karyawan akan mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi apabila mereka merasa bahwa ada hubungan yang kuat antara usaha dan kinerja, kinerja dan penghargaan, serta penghargaan dan pemenuhan tujuan-tujuan pribadi. Setiap hubungan ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Supaya usaha menghasilkan kinerja yang baik, individu harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja, dan sistem penilaian kinerja yang mengukur kinerja individu tersebut harus dipandang adil dan objektif. Hubungan kinerja – penghargaan akan menjadi kuat bila individu merasa bahwa yang diberi penghargaan adalah kinerja (bukannya senioritas, alasan pribadi, atau kriteria lainnya). Hubungan terakhir dalam teori harapan adalah hubungan penghargaan – tujuan. Motivasi akan tinggi sampai tingkat di mana penghargaan yang diterima seorang individu atas kinerja yang tinggi memenuhi kebutuhan-kebutuhan dominan yang konsisten dengan tujuan-tujuan individual (Robbins, 2008 dalam Efendy, 2010).

Konsisten dengan teori harapan, usaha harus ditingkatkan ketika karyawan melihat bahwa penghargaan diberikan berdasarkan kriteria kinerja. Kinerja karyawan adalah sebuah fungsi (f) dari interaksi kemampuan (A) dan motivasi (M); yaitu $\text{kinerja} = f(A \times M)$. Apabila salah satu dari keduanya tidak memadai, kinerja akan dipengaruhi secara negatif. Jadi, selain motivasi, kemampuan (berupa kecerdasan dan keterampilan) seorang individu harus dipertimbangkan ketika menjelaskan dan memprediksi kinerja karyawan dengan akurat. Tetapi, ternyata masih ada satu faktor lagi. Faktor itu adalah peluang untuk bekerja (*opportunity to perform, O*), sehingga terbentuk fungsi $\text{kinerja} = f(A \times M \times O)$. Meskipun seorang individu bersedia dan mampu, mungkin ada rintangan-rintangan yang menghalangi kinerja (Robbins, 2008 dalam Efendy, 2010).

2.1.2 Pengertian Audit

Menurut *Committee of Auditing Concepts* (2005) dalam Ashari (2011) Pengertian Auditing adalah :

“suatu proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti –bukti secara objektif mengenai suatu pernyataan tentang kegiatan atau kejadian ekonomis untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan.”

Menurut Arrens and Loebbecke (2005) dalam Ashari (2011) pengertian auditing adalah :

“suatu kegiatan pengumpulan dan penilaian bukti – bukti yang menjadi pendukung informasi kuantitatif suatu entitas untuk menentukan dan melaporkan sejauh mana kesesuaian antara informasi kuantitatif tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh institusi atau orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Leo Hebert (2005) dalam Ashari (2011) pengertian auditing adalah :

“ suatu proses kegiatan selain bertujuan untuk mendeteksi kecurangan atau penyelewengan dan memberikan simpulan atas kewajaran penyajian akuntabilitas, juga menjamin ketaatan terhadap hukum, kebijaksanaan dan peraturan melalui pengujian apakah aktivitas organisasi dan program dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.”

2.1.3 Proses Audit Sektor Publik

Langkah – langkah dalam proses audit (Indra Bastian, et.al) adalah : (1) Perencanaan (*PLANNING*) yang di dalamnya meliputi (a) Deskripsi sistem akuntansi keuangan sektor publik, (b) Menyusun tujuan dan lingkup audit, (c) Menilai resiko, (d) Rencana audit (2) Pelaksanaan (*EXECUTING*) yang di dalamnya meliputi (a) Mengembangkan program audit, (b) Sistem pengendalian internal, (c) Melakukan pengujian prosedur analitik pengujian substantif (jika buruk), (d) Melakukan pengujian bersandar pada pengendalian internal pengujian substantif (jika baik) (3) Pelaporan (*REPORTING*) yang di dalamnya meliputi (a)

Review kertas kerja dan kesimpulan, (b) Analisis hasil audit, (c) Laporan audit dan LHP Bawasda Pemda.(Ashari, 2011)

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga proses besar. Tiga proses tersebut adalah perencanaan (termasuk didalamnya aktifitas penetapan APBD/penganggaran), penatausahaan (proses pelaksanaan APBD) dan pelaporan (pertanggungjawaban APBD). Proses akuntansi merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang mengharuskan setiap pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaporkan seluruh transaksi ke dalam laporan keuangan. Struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah yang dirinci berdasarkan urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan. Sampai sejauh ini, di Indonesia belum di atur mengenai standar akuntansi keuangan pemerintah yang merupakan acuan untuk menyusun dan membuat pelaporan keuangan pemerintah. Meskipun di tahun 2002 dan tahun 2003 telah dilakukan sejumlah dengar pendapat publik atas 11 rancangan publikasian mengenai standar akuntansi keuangan pemerintah. Namun sampai sekarang belum ada pengesahannya sehingga berdampak pada penyusunan pelaporan keuangan dan juga audit atas pelaporan keuangan pemerintah daerah. (Afiah, 2009 dalam Efendy,2010)

2.1.5 Pengertian Pengawasan

Guntur dkk, (2005:89) dalam Suseno (2013), mengatakan bahwa “Pengawasan adalah sebagai keseluruhan kegiatan membandingkan, mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kriteria, norma dan standar”.

Menurut Halsey (2003:8) dalam Suseno (2013), pengawasan ialah memilih orang yang tepat untuk tiap pekerjaan; menimbulkan minat terhadap pekerjaannya pada tiap-tiap orang dan mengajarkan bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya; mengukur dan menilai hasil kerjanya untuk mendapat keyakinan apakah pelajaran itu telah dipahami dengan wajar; mengadakan koreksi-koreksi bilamana perlu dan memindahkan orang kepada pekerjaan yang lebih sesuai atau memberhentikan mereka yang ternyata tidak dapat bekerja dengan baik; memuji bila ia selayaknya mendapat pujian dan member

penghargaan atas kerja yang baik; dan akhirnya menyelaraskan setiap orang ke dalam suasana kerja sama yang erat dengan teman-teman sekerjanya; semuanya itu dilakukan secara adil, sabar dan tenggang menenggang, sehingga setiap orang akan menjalankan pekerjaannya dengan mahir, teliti, cerdas bersemangat dan sempurna.

Menurut Manullang (1996:127) dalam Suseno (2013), Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memeperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. Dua prinsip pokok, yang merupakan suatu *condition sine qua non* bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi serta wewenang kepada bawahan.

2.1.6 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Cahyat, 2004 dalam Efendy, 2010).

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk

melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susmanto, 2008 dalam Efendy, 2010).

2.1.7 Pengertian Inspektorat

Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga Pengawasan Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun Eksternal. Untuk tingkat kementerian kita kenal adanya Irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Menurut UU No. 15/2004 dan UU No.15/2006, BPK adalah institusi yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan keuangan daerah. Sementara di daerah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota) dibentuk sebuah SKPD yang berfungsi sebagai pengawas intern pemerintah yang disebut inspektorat yang bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah. BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah daerah dan oleh karenanya, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah daerah wajib disampaikan kepada BPK. Inspektorat daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah,

yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas pengawasan. Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten/ Kota terdiri atas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kelompok Jabatan Fungsional (Pearturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota).

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah :

1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi *quality assurance*.
2. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas.
4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses kegiatan berlangsung.
5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak.

2.1.8 Pengertian *Good Governance*

Good governance menurut Sapariyah (2011) dalam Bolang,dkk (2013), merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. Pemahaman *good governance* dapat didefinisikan dengan seberapa jauh pemahaman atas konsep tata kelola perusahaan atau organisasi yang baik oleh para auditor. Pemahaman *good governance* merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Pemahaman atas *good governance* adalah untuk menciptakan keunggulan manajemen kinerja baik pada perusahaan bisnis manufaktur (*good corporate governance*) ataupun perusahaan jasa, serta lembaga pelayanan publik atau pemerintahan (*good government governance*).

2.1.9 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan kemungkinan auditor menemukan serta melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah dengan berpedoman pada standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan. Definisi kualitas audit menurut De Angelo (1981) dalam Efendy, 2010, adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem

akuntansi klien. Sedangkan Christiawan (2005) dalam Singgih dan Icuk (2010) mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa auditor yang kompeten adalah auditor yang “mampu” menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang "mau" mengungkapkan pelanggaran tersebut. Jelas terlihat bahwa independensi dan kompetensi merupakan faktor penentu kualitas audit dilihat dari sisi auditor.

Kualitas audit biasanya diukur dengan pendapat profesional auditor yang tepat dan didukung oleh bukti dan penilaian objektif. Dimana auditor memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pemegang saham jika mereka memberikan laporan audit yang independen, dapat diandalkan dan didukung dengan bukti audit yang memadai (FRC, 2006) dalam Badjuri (2011).

2.1.10 Independensi

Independensi merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit (Trisnaningsih, 2007). Mulyadi (1998) dalam Badjuri (2011) menyatakan bahwa independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab pendapat yang dinyatakan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan akan dipertanyakan jika auditor tidak sungguh – sungguh bersikap independen. Sikap independensi auditor dapat menghindarkan hubungan yang mungkin mengganggu obyektivitas auditor. Tanpa independensi, pendapat auditor akan berkurang nilainya. Sebagai konsekuensinya, auditor yang tidak independen tidak dapat memberikan suatu pendapat dan karenanya harus menolak memberikan suatu opini atau pendapat (M.Guy, 2002:15).

Dalam Guy (2002: 26), dijelaskan bahwa sesuai dengan *SAS No. 1, Generally Accepted Auditing Standards* (AU 150), auditor harus memiliki sikap mental yang independen selama penugasan. Independensi ini tergantung pada dua

faktor : karakter dasar auditor dan persepsi publik apakah auditor tersebut independen atau tidak.

Independensi mencakup dua aspek yaitu independensi dalam fakta (*in fact*) dan independensi dalam penampilan (*in appearance*). Independensi *in fact* merupakan kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Sedangkan independensi *in appearance* adalah independensi yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang di audit yang mengetahui hubungan antara auditor dengan kliennya. Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga, hubungan keuangan) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor berlaku tidak independen.

2.1.11 Motivasi

Istilah motivasi (*motivation*) dalam (Winardi, 2007: 1) berasal dari bahasa latin, yakni *movere*, yang berarti “menggerakkan” (*to move*). Motivasi (*motivation*) diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologi yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya (Danim, 2004:2). Terdapat tiga unsur yang termuat dalam istilah motivasi, yaitu: Pertama, faktor pendorong atau pembangkit motif, baik internal maupun eksternal. Kedua, tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, strategi yang diperlukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tersebut.

Moekijat dalam Efendy (2010) mendefinisikan motivasi sebagai keinginan di dalam seorang individu yang mendorong ia untuk bertindak. Sedangkan menurut Panitia Istilah Manajemen Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, motivasi adalah proses atau faktor yang mendorong orang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu; yang prosesnya mencakup: pengenalan dan penilaian kebutuhan yang belum dipuaskan, penentuan tujuan yang akan memuaskan kebutuhan, dan penentuan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan.

Menurut Suwandi dalam Efendy (2010) dalam konteks organisasi, motivasi adalah pemaduan antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan personal. Hal ini akan mencegah terjadinya ketegangan / konflik sehingga akan membawa pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Sehubungan dengan *audit* pemerintah, terdapat penelitian mandiri mengenai pengaruh *rewards instrumentalities* dan *environmental risk factors* terhadap motivasi partner auditor independen untuk melaksanakan *audit* pemerintah. Penghargaan (*rewards*) yang diterima auditor independen pada saat melakukan *audit* pemerintah dikelompokkan ke dalam dua bagian penghargaan, yaitu penghargaan intrinsik (kenikmatan pribadi dan kesempatan membantu orang lain) dan penghargaan ekstrinsik (peningkatan karir dan status). Sedangkan faktor risiko lingkungan (*environmental risk factors*) terdiri dari iklim politik dan perubahan kewenangan. Rincian lebih lanjut tentang faktor penghargaan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Motivasi Auditor Independen dalam Melakukan Audit Pemerintah

| Penghargaan Intrinsik | Penghargaan Ekstrinsik |
|---|--|
| Kenikmatan Pribadi: 1. Pekerjaan yang menarik 2. Stimulasi intelektual 3. Pekerjaan yang menantang (mental) 4. Kesempatan pembangunan dan pengembangan pribadi 5. Kepuasan pribadi | Karir: 1. Keamanan/kemampuan kerja yang tinggi 2. Kesempatan karir jangka panjang yang luas 3. Peningkatan kompensasi |
| Kesempatan membantu orang lain: 1. Pelayanan masyarakat 2. Kesempatan membantu personal klien 3. Kesempatan bertindak sebagai mentor bagi staf audit. | Status: 1. Pengakuan positif dari masyarakat 2. Penghormatan dari masyarakat 3. Prestis atau nama baik 4. Meningkatkan status social |

Sumber : Efendy, 2010.

2.1.12 Kompetensi

Kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek audit. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi auditor. Kompetensi ditunjukkan pula dengan keharusan bagi setiap auditor untuk memiliki keterampilan atau kemahiran profesi auditor yang diakui umum untuk melakukan audit. Karena itu secara profesi tidak semua orang boleh melakukan audit. (Ahmad, dkk, 2011)

Lee dan Stone (1995) dalam Efendy (2010), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Adapun Bedard (1986) dalam Lastanti (2005) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit (Efendy, 2010). Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Hayes-Roth mendefinisikan keahlian sebagai pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dari lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut. (Efendy, 2010)

Kompetensi merupakan kemampuan individu seorang pekerja yang memungkinkan ia mencapai kinerja yang berkualitas. Dalam literatur psikologi, pengetahuan spesifik dan lama pengalaman bekerja sebagai faktor penting untuk meningkatkan kompetensi. Ukuran kompetensi tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain dalam pembuatan keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain selain pengalaman.

2.2 Penelitian Terdahulu

Efendy (2010) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat daerah. Populasi penelitian ini adalah aparat Inspektorat Daerah Kota Gorontalo yang turut melakukan pemeriksaan regular. Data diambil dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisa regresi linear berganda (*multiple regrestion*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi, independensi, dan motivasi memberikan sumbangan terhadap variabel dependen (kualitas audit) sebesar 72,2%, sedangkan sisanya 27,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Ashari (2011) melakukan penelitian untuk memperoleh bukti empiris guna diketahui dan dianalisis tentang pengaruh keahlian, independensi dan etika terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan tingkat Pusat. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Sampel dipilih secara total sebanyak 52 auditor/pemeriksa. Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda, analisis ini didasarkan pada data dari 52 responden yang penelitiannya melalui kuesioner. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keahlian, independensi dan etika. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas auditor. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada seluruh auditor/pemeriksa Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan keahlian, independensi dan etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Secara parsial keahlian dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor, namun tidak untuk etika dimana tidak signifikan terhadap kualitas auditor. Pengaruh terbesar terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara adalah keahlian.

Kisnawati (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kabupaten dan Kota se-Pulau Lombok (Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram). Penelitian ini tergolong penelitian asosiatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi, independensi dan etika auditor sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Populasi penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) dan PNS selaku pejabat struktural yang tupoksinya melakukan pengawasan/pemeriksaan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sensus dimana semua auditor dijadikan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner. Jumlah kuisisioner yang disebar sebanyak 119 eksemplar, dari jumlah tersebut kembali 109 eksemplar. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda (Multiple Regression Analysis). Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Secara parsial kompetensi dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, hanya etika auditor yang berpengaruh terhadap kualitas audit.

Ahmad, dkk (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Pasaman yang ikut dalam tugas pemeriksaan, yaitu sebanyak 26 orang. Karena semua populasi menjadi sampel pada penelitian ini maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode sensus, yaitu penyebaran kuisisioner dilakukan pada semua populasi. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyebutkan bahwa kompetensi aparat inspektorat berpengaruh positif. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyebutkan bahwa independensi aparat inspektorat berpengaruh positif.

Bolang (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kota Tomohon yang ikut dalam tugas pemeriksaan, yaitu sebanyak 36 orang. Karena jumlah populasi sedikit, maka semua populasi akan dijadikan sampel. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus, dimana penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi. Hasil penelitian menunjukkan penolakan hipotesis pertama yang menyebutkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat di Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua bahwa independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Hasil penelitian pada hipotesis ketiga ini menyatakan bahwa pengalaman secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

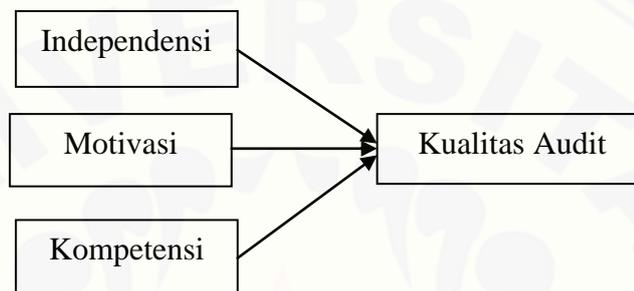
| No | Nama | Judul | Variabel | Sampel | Hasil Penelitian |
|----|---------------------------|---|--|---|--|
| 1. | Muh. Taufiq Efendy (2010) | Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (<i>Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Gorontalo</i>) | Variabel dependen: Kualitas audit. Variabel independen: Kompetensi auditor, independensi auditor, dan motivasi auditor. | Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kota Gorontalo yang ikut dalam tugas pemeriksaan, yaitu sebanyak 38 orang | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. |
| 2. | Ruslan Ashari (2011) | Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara | Variabel independen : Independensi, keahlian, dan etika. Variabel dependen: Kualitas audit. | Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Sampel dipilih secara total sebanyak 52 auditor/pemeriksa. | Hasil penelitian ini menunjukkan keahlian, independensi dan etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. |

| No | Nama | Judul | Variabel | Sampel | Hasil Penelitian |
|----|-----------------------|--|--|---|---|
| 3. | Baiq Kisnawati (2012) | Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor Pemerintah di Inspektorat Kabupaten dan Kota Se-Pulau Lombok) | Variabel independen : Independensi, kompetensi, dan etika. Variabel dependen: Kualitas audit. | Populasi penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten dan Kota yang tergolong sebagai auditor | Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, hanya etika auditor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. |
| 4. | Ahmad, dkk (2011) | Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman. | Variabel independen : Kompetensi dan independensi. Variabel dependen: Kualitas audit. | Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Pasaman yang ikut dalam tugas pemeriksaan, yaitu sebanyak 26 orang. | Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyebutkan bahwa kompetensi aparat inspektorat berpengaruh positif. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyebutkan bahwa independensi aparat inspektorat berpengaruh positif. |

| No | Nama | Judul | Variabel | Sampel | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------------|--|--|--|---|
| 5. | Marrieta Sylvie Bolang (2013) | Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. | Variabel independen: Kompetensi, independensi, dan pengalaman. Variabel dependen: Kualitas audit. | Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kota Tomohon yang ikut dalam tugas pemeriksaan, yaitu sebanyak 36 orang. | Hasil penelitian menunjukkan hipotesis pertama yang menyebutkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat di Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dan pengalaman secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif atau searah. |

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual disusun untuk menggambarkan hubungan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah independensi, motivasi, dan kompetensi. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Independensi dalam pengauditan merupakan penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit. Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Mulyadi (1998) dalam Badjuri (2011) independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Banyaknya penelitian mengenai independensi menunjukkan bahwa faktor independensi merupakan faktor penting bagi auditor untuk menjalankan profesinya.

Seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit harus didukung dengan sikap independen, dimana seorang auditor tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain, dan tidak dikendalikan oleh pihak lain. Dalam hubungannya dengan auditor,

independensi berpengaruh penting sebagai dasar utama agar auditor dipercaya oleh masyarakat umum. Seorang auditor yang memiliki sikap independen, maka ia akan memberi penilaian yang senyatanya terhadap laporan keuangan yang diperiksa, tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun. Maka penilaiannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah perusahaan yang diperiksa. Dengan demikian maka jaminan atas keandalan laporan yang diberikan oleh auditor tersebut dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Menurut Singgih dan Icuk (2010) jika seorang akuntan menyadari akan betapa besar perannya bagi masyarakat dan bagi profesinya, maka ia akan memiliki sebuah keyakinan bahwa dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, maka ia akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan profesinya tersebut. Menurut Badjuri (2011) dengan meningkatnya independensi maka akan semakin meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi independensi seorang auditor maka kualitas audit yang diberikannya semakin baik.

Hasil penelitian Ahmad, dkk (2011) menyebutkan bahwa independensi aparat inspektorat berpengaruh positif. Ashari (2011) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Bolang (2013) menunjukkan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka peneliti berpendapat bahwa terdapat hubungan antara independensi dengan kualitas hasil audit sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

2.4.2 Pengaruh Motivasi terhadap Kualitas Audit

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Motivasi dalam pengauditan merupakan derajat seberapa besar dorongan yang dimiliki auditor untuk melaksanakan audit secara berkualitas dan dapat mendorong auditor dalam

mencapai prestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.

Seorang auditor yang sangat termotivasi mampu menjaga dan mampu meningkatkan kualitas audit yang semakin baik. Dengan demikian, motivasi sangat berperan penting dalam mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001) dalam Efendy (2010) hanya motivasi yang akan membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Respon atau tindak lanjut yang tidak tepat terhadap laporan audit dan rekomendasi yang dihasilkan akan dapat menurunkan motivasi aparat untuk menjaga kualitas audit.

Penelitian Efendy (2010) menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian Debora (2012) menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan auditor. Penelitian Rinaldi (2013) menunjukkan dorongan yang dimiliki auditor untuk mencapai suatu tujuan tertentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

2.4.3 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, dan obyektif. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah.

Peneliti berpendapat bahwa dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta

keahlian khusus dibidangnya. Jadi untuk meningkatkan kualitas audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensinya. Menurut Alim dkk (2007) jika seorang auditor mempunyai kompetensi yang tinggi maka akan semakin baik kualitas hasil auditnya. Oleh sebab itu, auditor yang kompeten akan dengan mudah melakukan tugas-tugas auditnya, dan sebaliknya jika auditor kurang kompeten, maka dalam melaksanakan tugasnya auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Hasil penelitian Alim, dkk (2007) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian Ahmad, dkk. (2011) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan teori, argumen dan penelitian terdahulu, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Dilihat dari karakteristik masalahnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current* status dari subyek yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 1999 : 26). Berdasarkan jenis data yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian opini karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap fakta berupa opini atau pendapat orang (responden) (Indriantoro dan Supomo, 1999 : 29). Selain itu, jenis penelitian ini juga bertujuan untuk pengujian hipotesis.

Penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (Indriantoro, 1999 : 89). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Data primer dalam penelitian ini berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 1999 : 115). Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparat Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki (Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi) yang terlibat dalam tugas pemeriksaan. Sampel adalah bagian dari populasi (elemen) yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai objek penelitian (Efferin, dkk, 2004 : 58). Sampel dalam penelitian ini adalah aparat Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki (Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan